

SKRIPSI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN



Disusun Oleh:

**NURUL FITRI
NIM. 160602178**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Fitri
NIM : 160602178
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Nurul Fitri

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Perspektif Kemaslahatan

Disusun Oleh:

Nurul Fitri
NIM. 160602178

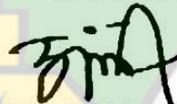
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



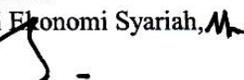
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,



Winy Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Fitri
NIM : 160602178
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : nurulfitrih@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU kripsi

Yang berjudul:

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh dalam Perspektif Kemaslahatan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Agustus 2020

Mengetahui,

Penulis

Nurul Fitri
NIM. 160602178

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, SE., M.Si. Ak.CA
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

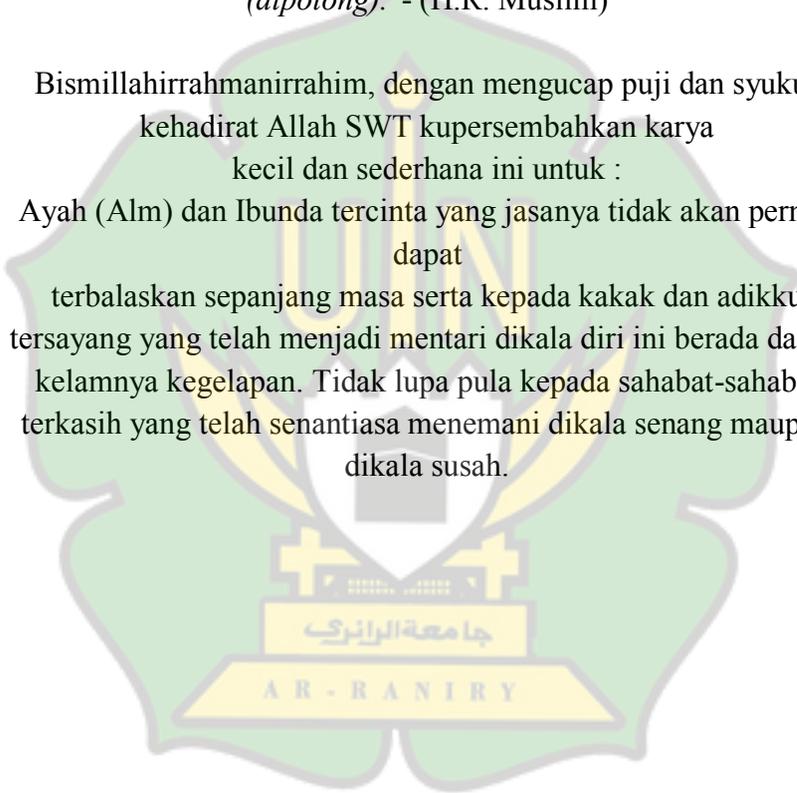
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”- (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."- (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :

Ayah (Alm) dan Ibunda tercinta yang jasanya tidak akan pernah dapat

terbalaskan sepanjang masa serta kepada kakak dan adikku tersayang yang telah menjadi mentari dikala diri ini berada dalam kelamnya kegelapan. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun dikala susah.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Perspektif Kemaslahatan”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun

secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, ME selaku Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Cut Dian Fitri, S.E.,M.Si.Ak. CA selaku pembimbing I dan Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr.T. Meldi Kesuma, SE., MM selaku penguji I dan Khairul Amri,SE.,M.Si selaku penguji II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Segenap Dosen dan staf

akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayah Thamrin Hanafiah (Alm) dan Ibu Yuliana, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan lainnya yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis

hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Nurul Fitri



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	AR - Ž ANIR	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’

14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَّ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/إي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i>	:	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-Madīnatul Munawwarah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>Talḥah</i>	:	طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Nurul Fitri
NIM : 160602178
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Aceh dalam perspektif kemaslahatan
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E.,M.Si.Ak. CA
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si
Kata Kunci : kemiskinan, upah minimum, pengangguran, kemaslahatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh dalam perspektif kemaslahatan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Variabel Upah Minimum Provinsi, Pengangguran dan kemiskinan. Data untuk penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2015-2019. Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Setelah pengujian *chow*, *hausman* dan *multiple langgrange*, maka disimpulkan bahwa pengujian yang paling tepat digunakan adalah pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari pendekatan model *fixed* menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berhubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh dengan hasil koefisien determinasi sebesar 98,46%.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	vii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Kemiskinan.....	13
2.1.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	15
2.1.2 Indikator Kemiskinan.....	16
2.1.3 Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan	18
2.1.4 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.....	20
2.2. Upah Minimum Provinsi	22
2.2.1 Teori Upah.....	23
2.2.2 Upah Dalam Perspektif Islam	25
2.2.3 Jenis- Jenis Upah.....	27
2.2.4 Tujuan Upah Minimum.....	29
2.3. Pengangguran.....	30
2.3.1 Teori Pengangguran	31
2.3.2 Pengangguran Dalam Perspektif Islam	32

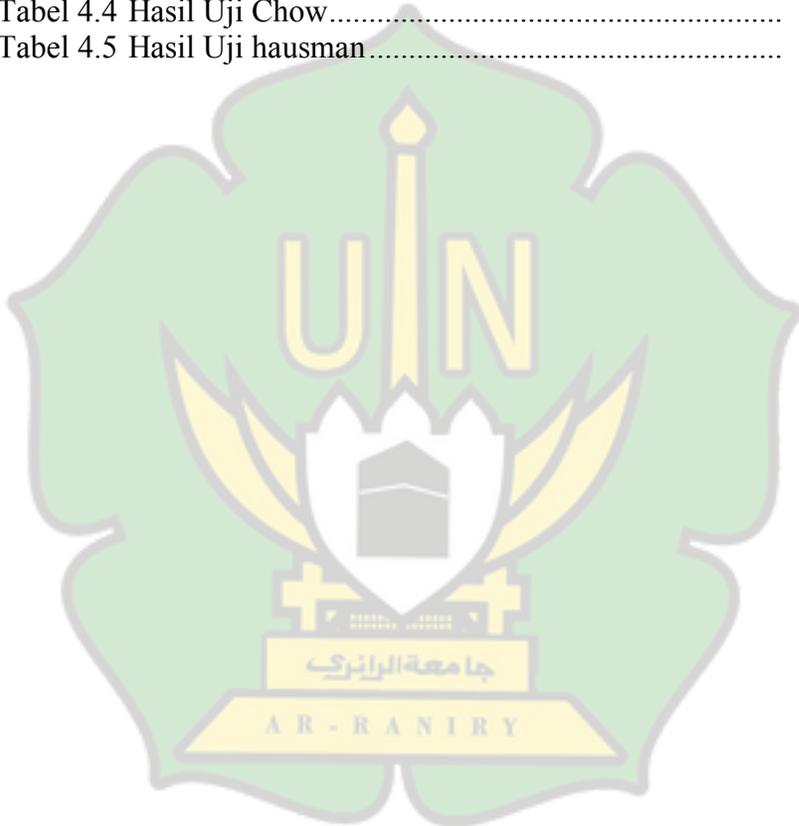
2.4 Keterkaitan Antar Variabel.....	33
2.5 Penelitian Terdahulu.....	35
2.6 Kerangka Pemikiran	41
2.7 Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	44
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	44
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	45
3.4 Teknik Analisis Data	46
3.4.1 Penentuan Model Estimasi	46
3.4.2 Tahapan Pengujian Model	48
3.5 Pengujian Hipotesis	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.1.1 Kemiskinan.....	54
4.1.2 Upah Minimum	56
4.1.2 Pengangguran.....	57
4.2 Analisis Data.....	59
4.2.1 Penentuan Model Esmitasi	59
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	62
4.2.3 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi).....	63
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda	65
4.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square).....	66
4.5 Pembahasan dan Hasil	67
4.5.1 Pengaruh upah minimum terhadap Kemiskinan.....	67
4.5.2 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan.....	69
4.5.3 Pengaruh Upah minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan.....	71

BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Keterbatasan.....	77
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangn UMP di Provinsi Aceh	3
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.2 Hipotesa Chow Test	38
Tabel 4.3 Hipotesa Hausman Test	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow	39
Tabel 4.5 Hasil Uji hausman	40



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.	2
Gambar 1.3 Perkembangan tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh	4
Gambar 1.4 Trend data Penduduk Miskin dengan Jumlah Pengangguraan Aceh.....	5
Gambar 2.1 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan11	
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Persentase tingkat Kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota di Aceh	34
Gambar 4.2 Persentase tingkat Upah Minimum di 23 Kabupaten/Kota di Aceh	36
Gambar 4.3 Persentase tingkat Pengangguran di 23 Kabupaten/Kota di Aceh	37
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	41
Gambar 4.5 Hasil Estimasi Fix Effect Model.....	42
Gambar 4.1 Persentase tingkat Pengangguran di 23 Kabupaten/Kota di Aceh	37



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Data tingkat kemiskinan, upah minimum, pengangguran d 23 Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2015-2019.....	53
Lampiran II Hasil Olah Data	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah tujuan dari suatu negara, yang mana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada pembangunannya. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tercatat 767 Juta orang di dunia hidup di bawah garis internasional kemiskinan (world bank, 2019). Kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Kemiskinan yaitu suatu masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksitas masalah kemiskinan membuatnya terus menjadi fenomenal di berbagai negara, termasuk Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang.

Pada dasarnya upaya menanggulangi kemiskinan sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan antara lain meningkatkan program perlindungan sosial, meningkatkan akses rumah tangga pada pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Upaya yang dilakukan

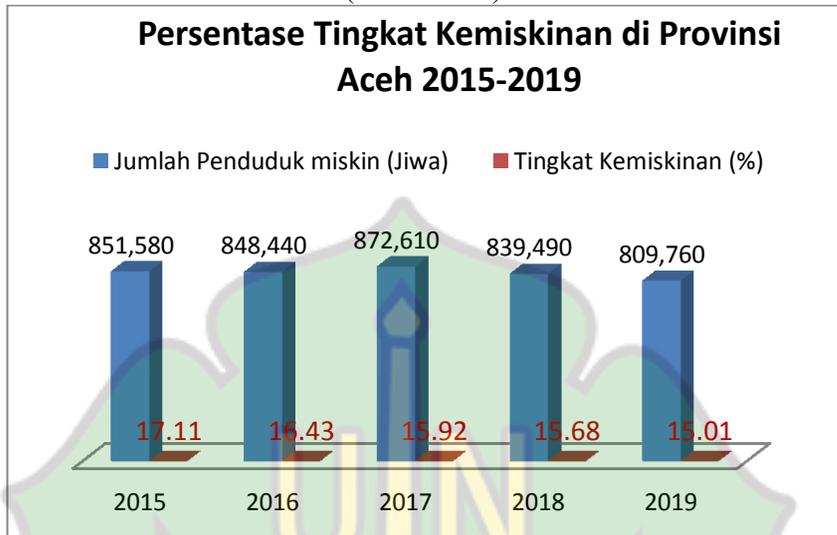
pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan sangatlah serius, Untuk memberdayakan masyarakat miskin dari perangkap kemiskinan, banyak kebijakan dari semua dimensi harus dilaksanakan secara bersamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi banyaknya program yang dijalankan pemerintah. Garis kemiskinan jika dilihat dari segi pendapatan sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan, jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp 1.990.170 per rumah tangga per bulan, artinya apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan dibawah Rp 1.990.170 masuk ke dalam kategori miskin (BPS,2019) . Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Menurut (M. Kuncoro dalam Ravi Dwi, 2010: 33) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (dalam Ravi Dwijayanto 2010:17). Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan

yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin. Adapun elemen kedua sifatnya lebih subjektif.

Kemiskinan juga merupakan suatu kondisi dimana terjadinya ketimpangan pendapatan yang diperoleh dibawah upah yang seharusnya. Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) Dan juga pengangguran yang semakin bertambah . Dari hal tersebut terdapat banyak variabel makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penyebab meningkat atau menurunnya kemiskinan yang ada pada suatu daerah antara lain Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran.

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional. Penduduk miskin tersebar pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk keseluruhan. Adapun grafik penduduk miskin di provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 1.1. Persentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (2015-2019)



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk miskin 851.580 jiwa, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 17.11%. Selanjutnya tahun 2016 sampai dengan 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh cenderung mengalami penurunan. Dari 16,43% pada 2016 menjadi 15,01% pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 809.760 jiwa.

Upah minimum di Indonesia pada awalnya ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah. Jika efektif, upah minimum dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan karena dapat

membantu penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Dalam ekonomi islam juga disebutkan agar upah pekerja dibayar sesegera mungkin sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhannya. Untuk perkembangan tingkat upah minimum di Provinsi Aceh, berdasarkan data Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1. Perkembangan UMP Di Provinsi Aceh (2015-2019)

Tahun	UMP	%
2015	Rp. 1.900.000	8,57
2016	Rp. 2.118.500	11,5
2017	Rp. 2.500.000	8,25
2018	Rp. 2.717.750	8,71
2019	Rp. 2.916.810	7,4

Sumber :Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh, 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan tingkat penetapan upah minimum rata-rata terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 1.900.000 meningkat sebanyak 8,57%. Hingga pada tahun 2016 tingkat upah menjadi sebesar Rp. 2.118.500, peningkatannya sebesar 11,5%, dan kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2019, dari Rp. 2.500.000 di tahun 2017 menjadi Rp. 2.916.810 pada tahun 2019. Kenaikan upah minimum dinilai wajar karena memang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya. Pada penelitian terdahulu Yuliarini

(2013) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dari tahun 2007-2011. Selanjutnya Woyanti (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil pengaruh positif dan signifikan UMP terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dengan koefisien 5.174,27. Hasil penelitian ini menggambarkan setiap kenaikan upah Rp. 100.000 per bulan akan meningkatkan 5.174 jiwa penduduk miskin.

Selain upah minimum, permasalahan lain yang dihadapi berbagai negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai.

Pengangguran di Indonesia angkanya diatas 5% setiap tahunnya. Pengangguran harus segera diatasi karena dapat menimbulkan beban sosial yang tinggi (Prawira, 2018). Dalam kaitannya dengan ekonomi islam, pengangguran adalah masalah yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Begitupun halnya dengan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh yang sering mengalami fase naik turun.

Grafik 1.3. Persentase tingkat pengangguran Provinsi Aceh tahun 2015-2019.



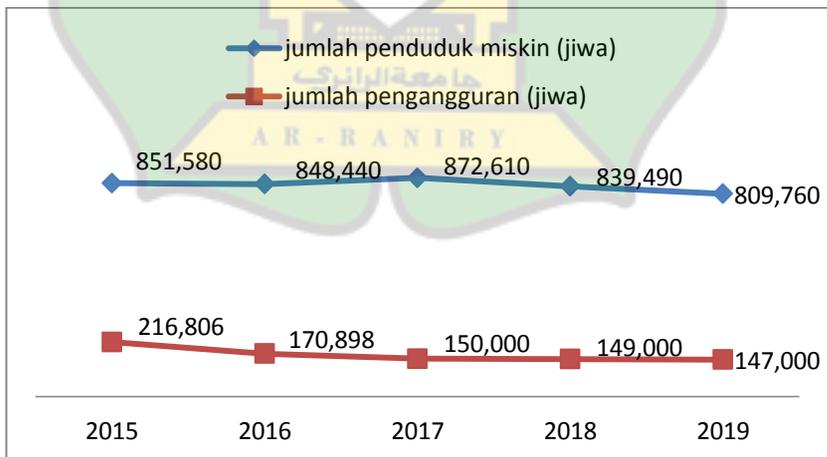
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

Berdasarkan grafik 3 diatas, pada tahun 2015 tingkat pengangguran kembali mengalami peningkatan sebesar 9,93 persen.. Selanjutnya ditahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 7.57 persen dengan jumlah penduduk sebesar 5.096.248 jiwa, dan terus mengalami penurunan hingga 3 tahun terakhir yaitu 2017 sebesar 6,57 persen, 2018 sebesar 6,38 persen dan 2019 sebesar 6,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja Aceh kian meningkat.

Sejumlah peneliti empiris yang menganalisis pengaruh berbagai variabel ekonomi makro terhadap terhadap kemiskinan, diantaranya dilakukan oleh Powers (1995) yang menemukan serta membuktikan bahwasanya tingkat pengangguran berhubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin; kenaikan tingkat

pengangguran menyebabkan jumlah penduduk miskin yang ikut meningkat. Hoover & Wallace (2003) menemukan bahwa tingkat kemiskinan sangat bergantung pada perubahan variabel pengangguran dan variabel upah minimum dalam pasar tenaga kerja. Warsilan (2016) meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika pengangguran meningkat akan terjadi kenaikan angka kemiskinan. Penelitian Sari dan Mangkuwinata (2017), mengkaji tentang Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh dari hasil perhitungan UMR dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Berikut Grafik 1.4 yang menjelaskan trend data jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran:



Sumber : Data diolah, tahun 2015-2019

Dilihat dari perbandingan data jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran dalam jangka waktu 2015-2019 menunjukkan hubungan yang negatif. Dalam ekonomi Islam juga memandang kemiskinan tidak dapat dibenarkan seseorang hidup di tengah masyarakat islam sekalipun warga non muslim menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya demi kemaslahatan umat. Maka dalam proses hubungan antar variabel yang berimbang terhadap kemiskinan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai dampak daripada masing-masing variabel terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Singkatnya di Provinsi Aceh di pengaruhi oleh faktor faktor diatas, dimana pengangguran yang cukup tinggi, sehingga pemerataan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan meneliti **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh dalam Perspektif Kemaslahatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh UMP terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?

3. Bagaimana pengaruh UMP dan pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh UMP terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk menganalisis pengaruh UMP, Inflasi dan pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya manfaat dalam beberapa aspek, antaranya:

1. Bagi instansi terkait
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran pada pemerintah tentang penerapan kebijakan UMP dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat serta kebijakan untuk mengurangi jumlah pengangguran khususnya pengangguran terdidik di Provinsi Aceh.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai analisis.

3. Bagi penulis

Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun kepada lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAU KEPUSTAKAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan model analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang paparan data dan hasil penelitian serta diskusi hasil penelitian tentang isi dari skripsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Kemiskinan bisa dipandang sebagai suatu hal yang absolut dan juga relatif. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini.

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (BPS, 2019). Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak

tahun 1976. Menurut Prof. Suyogyo kemiskinan didasarkan atas harga beras, yaitu tingkat konsumsi perkapita setahun yang sama dengan beras. Konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun (BPS, 2017)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2018)

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Chambers dalam Nasikun, dkk (2017), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

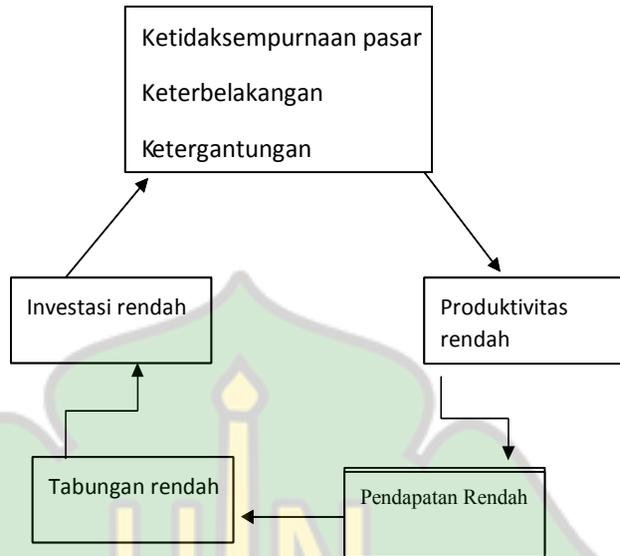
1. Kemiskinan Absolut, yaitu: pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan,

sandang, papan, dan kesehatan pendidikan yang dioerlukan untuk bisa hidup berkelanjutan.

2. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

2.1.1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dst. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Rukse, ekonom pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan : “ *A poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu karena dia miskin).



Gambar 2.1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

2.1.2. Indikator Kemiskinan

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan , 2001).

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidak mampuan seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup setiap hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran

finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu. World bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut world bank, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari US\$1 per hari dalam dolar PPP (Purchasing Power Parity). Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti standar minimum yang digunakan world bank tersebut, karena bagi negara-negara berkembang level tersebut masihlah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo kalori per kapita per hari) yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan

sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Badan pemerintah yang menggunakan ukuran kemiskinan relatif misalnya BKKBN. BKKBN mendefinisikan miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, serta kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

2.1.3. Faktor – Faktor Penyebab Kemiskinan

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena

perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi. Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja.
2. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif.
3. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya.
4. Keempat, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lainlain tidak dapat menjangkaunya
5. Kelima, ketidak stabilan politik berdampak pada ketidakberhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan

mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

Menurut penyebab kemiskinan menurut (Kuncoro,1997) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

2.1.4 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Islam memandang kemiskinan ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) jika hal ini tidak dapat terpenuhi, maka akan berimplikasi pada kemunduran eksistensi manusia. Kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang

diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak, yang disebut dengan kemiskinan konsumsi sehingga definisi ini masih kurang memadai di dalam perumusan solusi pengentasan kemiskinan. Menurut Islam, fakir miskin adalah orang/keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan atau orang/keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt menggunakan istilah itu dalam firman-Nya surah Al-Balad ayat 16:

مِسْكِينًا أَوْ ذَا مَرْتَبَةٍ

Artinya: “.....atau kepada orang miskin yang sangat fakir”

(Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab al-faqr, berarti membutuhkan (al-ihthiyarj). Dalam Islam instrument zakat di jadikan untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu

baik fakir maupun miskin. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak berpunya juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mampu (Atabik, 2015). Al-Qardhawi dalam Qadir (2001) mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi, yaitu:

- 1) Setiap orang Islam harus harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- 2) Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- 3) Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
- 4) Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- 5) Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
- 6) Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental.

2.2. Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota disuatu provinsi. Mulyapradana dan Hatta (2016:20) menyatakan UMP merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau

pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha atau kerjanya. Disebut UMP karena pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Adapun, penetapan dan pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur serentak setiap tanggal 1 November setiap tahunnya untuk diberlakukan pada periode satu tahun berikutnya. Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

2.2.1. Teori Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama dia melakukan pekerjaan yang dipandang melakukan pekerjaan. Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh/pekerja baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun untuk menjaga agar pemberian upah tidak terlalu rendah kebawah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Standar upah terendah tersebut disebut upah minimum atau dalam otonomi daerah disebut dengan upah minimum provinsi.

Teori Upah Alam, dari David Ricardo Teori ini menerangkan:

1. Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.

2. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006).

Kaufman (dalam Achmad Khabhibi, 2010: 49), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

2.2.2. Upah Dalam Perspektif Islam

Upah dalam Islam disebut juga dengan Ujrah. Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap

pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Sunnah Rasul mengenai dasar hukum sewa menyewa, yaitu:

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه¹

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering."

Implikasi dari Sunnah tersebut untuk masa sekarang adalah bahwa upah dibayarkan pengusaha kepada pekerja tepat pada waktunya. Upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi pekerja, maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut.

Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Tingkat upah minimum dapat dipahami dari firman Allah:

إِنَّ لَكَ أَلَّا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya: "Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang - Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upah diberikan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Upah tersebut diukur

dari kebutuhan pokok para pekerja. Islam juga menjelaskan bahwa upah tersebut diberikan secara adil.

2.2.3. Jenis- Jenis Upah

Jenis-jenis upah yang terdapat dalam kepustakaan hukum ketenagakerjaan dapat dikemukakan sebagai berikut (Asikin, 1993:89):

- a. Upah Nominal, adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya.
- b. Upah Nyata, adalah upah yang harus benar-benar diterima oleh seseorang yang berhak.
- c. Upah Hidup, dalam hal ini upah yang akan diterima seseorang buruh itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarnya.
- d. Upah Wajar, adalah sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan buruh kepada penguasa

atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

- e. Upah Minimum, adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja diperusahaannya.

Sedangkan menurut Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum terdiri atas:

1. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
3. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah

penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga kerja. Upah uang yaitu jumlah uang yaitu diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010: 24).

Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu:

- a) Pemberian imbalan atau nilai pekerjaan
- b) Penyediaan intensif
- c) Jaminan kebutuhan buruh

Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jika tingkat upah relatif rendah maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit.

2.2.4. Tujuan Upah Minimum

Menurut Rachman (2005) tujuan penetapan upah minimum dibedakan secara makro dan mikro. Secara makro penetapan upah minimum bertujuan untuk:

- (a) pemerataan pendapatan,
- (b) peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja,
- (c) perubahan struktur biaya industri sektoral,
- (d) peningkatan produktivitas kerja nasional, peningkatan etos dan disiplin kerja.

Sementara secara mikro tujuan upah minimum yakni :

- (a) sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot,
- (b) mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, dan
- (c) meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat dan terbebas dari kemiskinan. (Kaufman, 2000).

2.3. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ditinjau dari sudut pandang individu, pengangguran menimbulkan masalah ekonomi dan social kepada

siapa yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluarannya. Selain itu pengangguran juga dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga (Sadono Sukirno, 2004:14)

2.3.1. Teori Pengangguran

Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus di peruntukan bagi Negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap dibanyak Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal, dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas. (Sadono Sukirno, 2006:196)

Berdasarkan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang muncul karena pencari kerja masih mencari pekerjaan yang sesuai jadi ia menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran ini tidak menimbulkan masalah, dan bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan komposisi perekonomian. Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah negara. Meskipun demikian, pengangguran jenis ini

bisa diatasi dengan melakukan pelatihan agar tercipta tenaga kerja terampil.

3. Ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena faktor musim, misalnya para pekerja di industri yang mengandalkan hidupnya dari pesanan. Pengangguran jenis ini juga tidak menimbulkan banyak masalah. Meskipun belum ada bukti empirik yang mendukung, pengangguran yang muncul karena keterpurukan industri sebagian besar adalah pengangguran friksional dan struktural. Pengangguran friksional yang muncul di Indonesia tidak karena menganggur secara “sukarela” melainkan karena kondisi krisis ekonomi (M. Kuncoro dala Whisnu Adi, 2011: 40).

2.3.2. Pengangguran Dalam Perspektif Islam

Dari sudut pandang islam, pengangguran bukanlah tanggungjawab mutlak dari pemerintah karena hal ini termasuk tanggungjawab berbagai pihak termasuk umat islam. Menurut Qardhawi pengangguran terbagi menjadi 2 macam :

- 1) pengangguran jabariyah, yang bermakna menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan
- 2) pengangguran khiyariyah, yaitu orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan.

Islam sangat melarang untuk menganggur dan sangat menganjurkan untuk bekerja baik untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun akhirat dalam waktu yang sama. Larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan sedangkan kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam al-Quran ataupun hadist, salah satunya terdapat pada QS.At-Taubah:105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Dari ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja namun bekerja bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki tetapi juga sebagai ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses di akhirat kelak. Dan segala sesuatu harus diniatkan pada kebaikan agar mendapatkan hasil yang baik pula.

2.4. Keterkaitan Antar Variabel

2.4.1. Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan,

efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman 2000 dalam Achmad Khabibi, 2010: 49). Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik. Upah minimum berpengaruh secara tidak langsung merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan dimana upah ini digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.

2.4.2. Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraanya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan

suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010: 34), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Sari dan Mangkuwinata (2017), mengkaji tentang Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Berdasarkan hasil penelitian secara parsial (uji t) untuk inflasi, diperoleh nilai t hitung sebesar 0.929 dan nilai t tabel sebesar 1.796. Hasil uji t untuk variabel inflasi yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $0.929 < 1.796$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Sedangkan untuk Upah Minimum Regional (UMR), diperoleh nilai t hitung sebesar 2.372 dan nilai t tabel sebesar 1.796. Hasil uji t untuk variabel UMR yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.372 > 1.796$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial UMR berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dan pengangguran diperoleh nilai t hitung sebesar 0.104 dan nilai t tabel sebesar

1.796. Hasil uji t untuk variabel pengangguran yaitu $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $0.104 < 1.796$. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dan berdasarkan secara simultan (uji f) diperoleh nilai F hitung sebesar 3.550 dan F tabel sebesar 3.49. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung $> F \text{ tabel}$ atau $3.550 > 3.49$. Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut inflasi, UMR dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Ihsan dan Ikhsan (2018) meneliti Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya UMP, kemiskinan akan semakin menurun. Selanjutnya inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa peningkatan inflasi akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dari meningkatnya harga-harga barang dan penurunan daya beli masyarakat akan barang-barang kebutuhan. Dan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk menganggur tidak mengurangi kemiskinan.

Warsilan (2016) meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil

penelitian menunjukkan Laju Pertumbuhan dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika pendapatan perkapita masyarakat meningkat akan mengurangi angka kemiskinan. Tetapi dalam penelitian ini hasil perhitungan yang diperoleh tidak signifikan sehingga bisa dianggap kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika Pendidikan masyarakat meningkat akan mengurangi angka kemiskinan, sedangkan Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika pengangguran meningkat akan terjadi kenaikan angka kemiskinan. Kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten kutai Kartanaegara. Dan Secara bersama sama keempat variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun jika secara parsial hanya pengangguran dan pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hardiani (2013) meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi. Selanjutnya secara simultan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Jambi. Sedangkan secara parsial variabel

yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan secara bersama-sama terhadap pengangguran di Kota Jambi 42,6 persen. Dan Berdasarkan hasil penelitian diketahui korelasi antara tingkat kemiskinan dengan tingkat pengangguran di Kota Jambi adalah negatif dan sangat rendah.

Amalia (2012) meneliti Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran nyatanya tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia (NTT, Sulawesi Selatan dan Papua) karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih menganggur. Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pendidikan. Dari ketiga variable penelitian, pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan di KTI.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1	Junita Sari, Denny Sumantri Mangkuwinata (2017)	Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Secara parsial, inflasi dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan UMR berpengaruh ,secara simultan inflasi, UMR dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh
2	Khairil ikhsan dan Ihsan (2018)	Analisis pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran terhadap kemiskinan Provinsi Aceh	UMP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, Dan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
3	Warsilan,Rochaida.E, Aziz.A.G (2016)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Laju Pertumbuhan dan Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan Dan Secara bersama

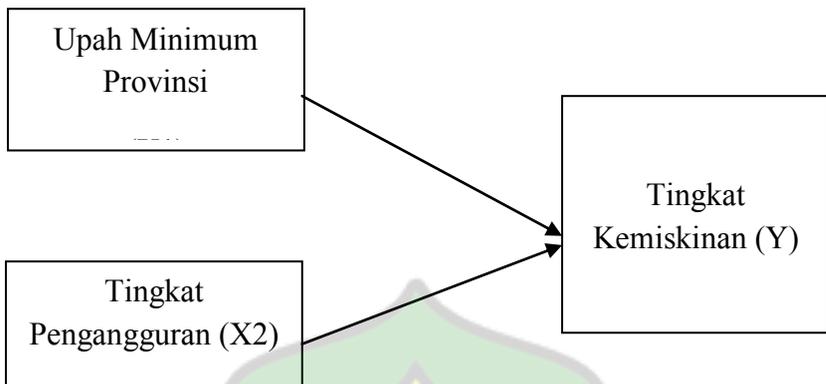
4	Hardiani, Amir. A, Harlik (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi	<p>sama keempat variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan secara simultan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi. Selanjutnya secara simultan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Jambi. Sedangkan secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan.</p>
---	----------------------------------	---	--

Tabel 2.5 - lanjutan

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
5	Amalia, F(2012)	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KIT) Periode 2001-2010	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengangguran nyatanya tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia (NTT, Sulawesi Selatan dan Papua) karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih menganggur. Variable inflasi berpengaruh negative terhadap tingkat pendidikan. Dari ketiga variable penelitian, pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan di KTI.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:



Sumber: Dari pengembangan peneliti berdasarkan penelitian terdahulu (2020)

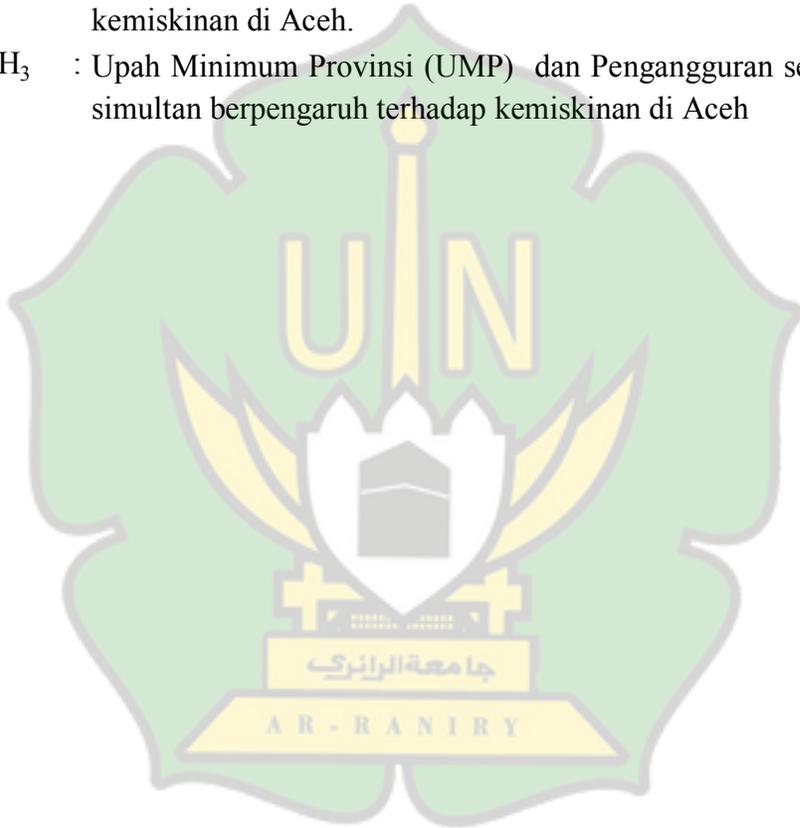
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:

- H_{01} : Tidak ada pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) secara parsial terhadap kemiskinan di Aceh
- H_1 : Upah Minimum Provinsi (UMP) secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh.

- H_{02} : Tidak ada pengaruh Pengangguran secara parsial terhadap kemiskinan di Aceh
- H_2 : Pengangguran secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh
- H_{03} : Tidak ada pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan di Aceh.
- H_3 : Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengangguran secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal-jurnal ilmiah tentang perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2019. Data yang diteliti meliputi data upah minimum provinsi, pengangguran terbuka, dan kemiskinan. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time series* dan *cross section*. Data *time series* periode tahun 2015-2019 sedangkan data *cross section* adalah 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting digunakan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2011; 30) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai acara. Apabila dilihat dari berbagai sumber, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data

silang (cross section), yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013).

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 38). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah upah minimum dan pengangguran.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan (Y) adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data persentase penduduk miskin di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2015-2019. (Dalam Persen). Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh.
2. Upah minimum (X1) yaitu upah tahunan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap (Permenaker 01/1999). Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah upah minimum Provinsi Aceh tahun 2015-2019. (dalam persen, rupiah yang diubah ke bentuk persen dengan cara di per sejuta)

3. Pengangguran Terbuka (X2) adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2015-2019 yang diukur dalam satuan persen (dalam persen) diambil dari BPS.

3.4 Teknik Analisis Data

Jenis data dan hipotesis sangat berpengaruh dalam menentukan ketepatan pemilihan statistik alat uji. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis sebagai berikut :

1. Melakukan pemilihan model estimasi dengan melakukan pengujian *Chow-test*, dan *Housman-test*.
2. Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda, yang harus memenuhi kriteria yaitu, uji F-test dan uji T-test.

3.4.1 Penentuan Model Estimasi

Penelitian yang menggunakan jenis data panel memiliki tiga jenis model regresi yang berbeda, yaitu:

1. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS).

Common Effect Model adalah model sederhana yang menggabungkan antara data time series dan cross section. Common effect tidak memperhatikan dimensi waktu dan individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan Ordinary Least

Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dapat dikatakan model ini merupakan model yang sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model.

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \dots + \epsilon_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

2. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy. Pendugaan parameter regresi panel dengan Fixed Effect Model menggunakan teknik penambahan variabel dummy sehingga metode ini seringkali disebut dengan Least Square Dummy Variable model. Gujarati (2004) mengatakan bahwa pada Fixed Effect Model diasumsikan bahwa koefisien slope bernilai konstan tetapi intercept bersifat tidak konstan.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + \dots + \epsilon_{it} + \mu_{it} \dots (3.4)$$

3. Random Effect Model atau teknik Generalized Least Square (GLS).

Random Effect Model mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar variabel dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing- masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect yaitu dapat

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model.

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \epsilon_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.5)$$

3.4.2 Tahapan Pengujian Model

Penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan 3 uji yang berbeda yaitu Chow-test, Housman-test, dan Lagrange Multiplier-test yang mana masing-masing uji tersebut membantu untuk memilih diantara Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Model manakah yang sebaiknya digunakan:

1). Chow-test

Uji Chow disebut juga sebagai uji Redudant Fix Effect atau Likelihood Ration. Uji ini dilakukan untuk menentukan diantara Common Effect Model dan Fix Effect, model terbaik manakah yang dapat digunakan. Hipotesis dari uji Chow adalah jika H_0 diterima maka model yang dipilih adalah Common Effect sebaliknya jika H_a yang diterima dan H_0 ditolak maka model yang dipilih atau model yang terbaik untuk digunakan adalah Fix effect Model. Apabila p value lebih kecil dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima sebaliknya jika p-value lebih besar dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Jika hasil dari uji Chow menemukan bahwa model yang sebaliknya

digunakan adalah model Common Effect maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier sebaiknya jika hasil Fix Effect Model maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji Hausman.

2). Housman-test

Uji Housman dilakukan untuk menentukan diantara Fix Effect Model dan Random Effect Model manakah yang lebih baik untuk digunakan. Hipotesis dari uji Housman adalah jika H_0 diterima maka model yang dipilih adalah Random Effect sebaliknya jika H_a yang diterima dan H_0 yang diterima maka model yang pilih atau model yang terbaik digunakan adalah Fix Effect Model. Apabila p-value lebih kecil dari nilai signifikan ($p < \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima sebaliknya jika p-value lebih besar dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Jika hasil dari uji Housman adalah Fix Effect Model maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier namun, sebaliknya jika hasilnya adalah Random Effect maka dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier.

3). Lagrange Multiplier-test

Uji Lagrange Multiplier adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih antara model Common Effect dan Random Effect Model. Hipotesis dari uji Lagrange Multiplier adalah jika H_0 diterima maka model yang

dipilih adalah Common Effect sebaliknya jika H_a yang diterima dan H_0 yang ditolak maka model yang dipilih atau model terbaik untuk digunakan adalah Random Effect. Apabila p-value lebih kecil dari nilai signifikan ($p < \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a sebaliknya jika p-value lebih besar dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Jika hasil uji ini adalah Common Effect Model maka model yang sebaiknya digunakan adalah Common Effect sebaliknya jika hasil yang dipilih adalah Random Effect Model maka model yang sebaiknya digunakan adalah Random effect.

3.5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Perhitungan statistik disebut dengan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (dimana H_0 ditolak). Sebaiknya disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_0 diterima (Priyatno, 2010: 9). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Uji simultan (Uji F)

Uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat. Kriteria Uji-F yaitu, jika *P-value* dan *F-Statistics* lebih besar dari α , berarti variabel bebas tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat, sedangkan apabila *P-value* dan *F-Statistics* lebih kecil dari α , berarti variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Pengujian hipotesis pada uji F dapat diketahui dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} sebagai berikut:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap Y
- H_a : minimal $\beta_i \neq 0$, setidaknya ada 1 variabel bebas X yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Y dimana $i = 1, 2$,

Kriteria Uji F adalah:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (keseluruhan variabel bebas X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y).
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (setidaknya ada 1 variabel bebas X yang berpengaruh terhadap variabel terikat Y).

2) Uji Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau

tidak sama dengan nol, yang artinya variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji hipotesis dapat diketahui dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} sebagai berikut:

- $H_0: \beta_i = 0$, artinya masing-masing variabel X_i tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y , dimana $i = 1, 2$
- $H_a: \beta_i \neq 0$. Artinya masing-masing variabel X_i memiliki pengaruh terhadap variabel Y , dimana $i = 1, 2$

Kriteria uji t adalah:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y)
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y)

Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%) pada taraf signifikansi 95%.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan suatu data. Sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dan hanya bisa memberikan gambaran dari suatu sampel. Pada bab ini akan membahas tentang karakteristik dari kemiskinan, pendidikan dan perkawinan usia dini. Hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh pada penelitian ini dipaparkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

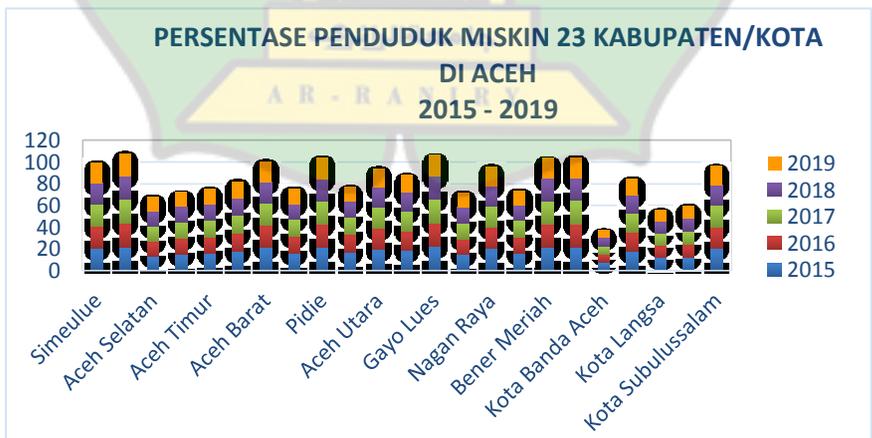
Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Dekskriptif

	Kemiskinan	Upah minimum	Pengangguran
Mean	16.69576	2.500000	6.550978
Median	17.02000	2.600000	6.675000
Maximum	22.11000	2.900000	17.05000
Minimum	7.220000	1.900000	1.020000
Std. Dev.	3.719720	0.376216	3.193878
Skewness	-0.563315	-0.687243	0.590872
Kurtosis	2.737324	2.000000	3.445074
Jarque-Bera	5.130126	11.07532	6.112679
Probability	0.076914	0.003936	0.047060
Sum	1536.010	230.0000	602.6900
Sum Sq. Dev.	1259.105	12.88000	928.2780
Observations	92	92	92

Berdasarkan perhitungan yang dihasilkan pada tabel 4.1 maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan variable dependen pada penelitian ini yang dihitung berdasarkan tingkat persentase kemiskinan di 23 kabupaten/kota di aceh. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Tolak ukur dari kemiskinan yaitu berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan tabel 4.1 dari 92 sampel diperoleh nilai rata-rata (mean) kemiskinan adalah sebesar 16.69 dan kemiskinan tertinggi adalah 118.74 di tahun 2017 pada kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah 5,43 di tahun 2019 pada kota Sabang. Standar deviasi pada kemiskinan dalam penelitian ini lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar 3.71 sehingga dapat dikatakan data yang digunakan variatif. Berikut adalah gambaran rata-rata kemiskinan Indonesia tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada gambar 4.1



Gambar 4.1
Persentase Kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota Tahun 2015 sampai 2019

Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata persentase kemiskinan tahun 2015 sampai tahun 2019. Secara keseluruhan persentase kemiskinan kabupaten/kota di Aceh, kabupaten Aceh Singkil menempati peringkat pertama kemiskinan dengan persentase 20 persen dan disusul Kabupaten Gayo Lues sebanyak 19 persen. Sementara jika dilihat dari sisi jumlah paling banyak penduduknya, daerah termiskin di Aceh yaitu Kabupaten Aceh Utara, berjumlah sebesar 118,74. kemiskinan di Aceh berkorelasi dengan upah, pekerjaan dan pengangguran. Banyak peluang pekerjaan di Aceh malah dikerjakan oleh tenaga kerja dari daerah lain, sementara masyarakat di sekitar lokasi jarang terlibat.

Angka kemiskinan di Aceh sendiri berkurang sebanyak 9 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang jumlahnya 819 ribu orang atau 15,32 persen. Dari jumlah itu, angka kemiskinan Aceh menurun 0,31 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan September 2018, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 21 ribu orang atau 15,68 persen. Sebelumnya Aceh menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera dan berada pada urutan ke 6 secara nasional. Rata-rata persentase kemiskinan di Aceh tahun 2014 sampai 2019 yaitu sebesar 16,21 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk miskin di Aceh bekerja di sektor pertanian dan mayoritasnya bekerja dengan status berusaha sendiri. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja juga menjadi penyebab kemiskinan di Aceh karena hal ini dapat meningkatkan pengangguran yang sangat berhubungan terhadap

kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan hal yang sangat penting dalam kemiskinan. Aceh lebih memprioritaskan pembangunan fisik, sehingga program pemberdayaan ekonomi yang produktif seperti memprioritaskan modal usaha sangat masih belum efektif. Kemudian banyaknya masyarakat Aceh yang belum terjun kedalam proyek-proyek, sehingga banyak pekerja asing yang terlibat dalam mengakses sumber daya ekonomi juga menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan di Aceh. Keadaan miskin di Aceh cukup memprihatinkan, tetapi masyarakat Aceh sendiri memiliki harta warisan atau setidaknya memiliki rumah yang bisa ditempati tidak seperti keadaan miskin di provinsi lain yang hidup di bawah jembatan.

4.1.2. Upah Minimum

Upah minimum merupakan usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin Berdasarkan tabel 4.1 dari 92 sampel diperoleh nilai rata-rata (mean) upah minimum adalah sebesar 2.50 dan upah minimum tertinggi adalah 2,90. Sementara itu, tingkat upah terendah 1.90. Standar deviasi pada pendidikan dalam penelitian ini lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar 0,37. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan variatif. Berikut adalah gambaran rata-rata pendidikan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada gambar 4.2



Gambar 4.2
Persentase Upah Minimum di Aceh Tahun 2015 sampai 2019

Gambar 4.2 menunjukkan tingkat upah minimum di Aceh pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Upah minimum setiap provinsi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, begitu pula dengan Aceh. Pada tahun 2019, upah minimum provinsi berjumlah Rp.2.900.000. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Penetapan upah minimum ini didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

4.1.2. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja Berdasarkan tabel 4.1 dari 92 sampel diperoleh nilai rata-rata (mean) pengangguran adalah sebesar 6.55 dan pengangguran tertinggi adalah 17.05. Sementara itu, tingkat pengangguran terendah 1.02. Standar deviasi pada pendidikan dalam penelitian ini lebih kecil dari pada nilai rata-rata yaitu sebesar 3,19. Sehingga dapat dikatakan data yang digunakan variatif. Berikut adalah gambaran rata-rata pendidikan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada gambar 4.3



Gambar 4.3

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka diKabupaten/kota Aceh Tahun 2015- 2019

Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata tingkat Pengangguran Terbuka diKabupaten/kota Aceh Tahun 2015- 2019 di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015 sampai 2019. Kabupaten Aceh Utara menempati rata-rata tertinggi pada tahun 2015 , dan kabupaten Bener Meriah menempati rata-rata terendah tahun 2019 yaitu sebesar 1,02 persen. Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan

kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan serta memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Penentuan Model Estimasi

Regresi data panel dilakukan dengan tiga model yaitu *common*, *fixed* dan *random*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan model tergantung kepada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga yang tersedia. Data panel yang telah dikumpulkan, dilakukan penentuan estimasi menggunakan *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Ringkasan hasil pengujian Chow-test dan Housman-test pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hipotesa Chow-test

Alat Penguji	Hipotesa	Ketentuan	Keterangan
Chow-test	H ₀ = Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>	Jika nilai p- value lebih besar dari pada nilai signifikansi ($p > \alpha$) maka H ₀ diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>
		Jika nilai p- value lebih kecil dari pada nilai signifikansi ($p < \alpha$) maka H ₀ ditolak dan H _a diterima	Model yang digunakan adalah <i>fix Effect Model</i>

Tabel 4.3
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	166.359513	(22,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	369.715059	22	0.0000

Sumber : Diolah menggunakan Eviews

Apabila nilai probabilitas $F > 0,05$ artinya H_0 diterima, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *common effect*. Namun jika nilai probabilitas $< 0,05$ artinya H_0 ditolak berarti model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Hasil dari uji chow pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* adalah 0,0000 atau $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect*. Selanjutnya kita akan melakukan regresi dengan model random effect.

Pada tabel *fixed effect* dan *random effect*, perlu dilakukan uji hausman untuk menguji model yang lebih tepat untuk digunakan antara *fixed effect* dan *random effect*. Oleh karena itu dilakukan uji hausman untuk mengetahuinya.

Tabel 4.3
Hausman test

Alat Pengujian	Hipotesa	Ketentuan	Keterangan
<i>Housman-test</i>	H0 = Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>	Jika nilai p-value lebih besar dari pada nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>
	Ha = Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>	Jika nilai p-value lebih kecil dari pada nilai signifikansi ($p < \alpha$) maka H0 ditolak dan Ha diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fix Effect Model</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Ringkasan hasil pengujian Housman-test pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.352036	2	0.3085

Sumber : Diolah menggunakan Eviews

Jika nilai p- value lebih besar dari pada nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H0 diterima, maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Jika nilai p- value lebih kecil dari pada nilai signifikansi ($p < \alpha$) maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka model yang digunakan adalah *Fix Effect Model*. Hasil dari uji hausman

mnghasilkan p value sebesar 0,3085 yang menunjukkan hasil pengujian tersebut signifikan ($p\text{-value} < 100\%$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima maka model yang terbaik adalah fix effect model.

Hasil dari pengujian *Chow-test* dan *Housman-test* sama-sama menunjukkan model terbaik yang dipilih adalah *Fix effect Model* maka dari itu tidak perlu lagi dilakukan uji *Lagrange Multiplier-test*.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

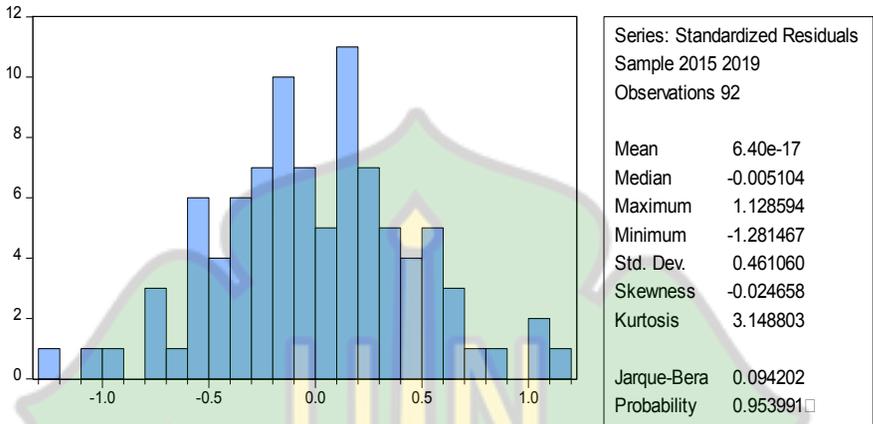
Regresi data panel memberikan alternative model, *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Model *common effect* dan *fixed effect* menggunakan pendekatan *ordinary least squared (OLS)* dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *ordinary least squared (OLS)* adalah uji normalitas. Walaupun demikian tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan *OLS* (Nachrowi, 2006).

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011).

Pada penelitian ini, uji normalitas bisa dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.



Sumber : Diolah oleh penulis (2020)

Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan ketentuan di atas yang menyatakan bahwa apabila P-value lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Jika dilihat dari hasil uji normalitas diketahui P-value (0.953991) $> \alpha$ sehingga kesimpulannya adalah data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.3 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi)

Uji kriteria statistik yang dilakukan pada penelitian yang meliputi uji t (uji signifikansi parameter/uji parsial), uji F (uji signifikansi simultan). Berikut adalah ringkasan hasil dari estimasi *Fix Effect Model* yaitu:

Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/27/20 Time: 02:47
 Sample: 2015 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.24633	0.649518	34.25054	0.0000
X1	-1.956467	0.188042	-10.40439	0.0000
X2	-0.100657	0.037160	-2.708763	0.0086

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.984636	Mean dependent var	16.69576
Adjusted R-squared	0.979133	S.D. dependent var	3.719720
S.E. of regression	0.537330	Akaike info criterion	1.821973
Sum squared resid	19.34446	Schwarz criterion	2.507241
Log likelihood	-58.81075	Hannan-Quinn criter.	2.098553
F-statistic	178.9142	Durbin-Watson stat	1.443196
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar.4.6 Ringkasan Hasil dari Estimasi Fix Effect Model

1. Uji Signifikansi Parsial

- Variabel upah minimum memiliki probability kurang dari 5% yaitu sebesar 0,0000 sehingga H_{01} ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum dengan kemiskinan.
- Variabel pengangguran memiliki probability lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,0086 sehingga H_{02} ditolak dan H_2

diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengangguran dengan kemiskinan.

2. Uji signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.4 di atas, maka diperoleh nilai F statistik sebesar 0,0000 yang mana nilai tersebut memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% sehingga semua variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada taraf kepercayaan 95%.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah menentukan model estimasi terbaik sehingga terpilihnya *Fix Effect Model* (FEM) maka selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan pemodelan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang lebih dari satu variabel. Regresi linear berganda juga digunakan untuk melihat arah hubungan baik positif atau negatif dari masing-masing variabel selain itu juga dapat memprediksi nilai dari variabel dependen jika variabel independennya mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Penelitian ini menggunakan kemiskinan sebagai variabel dependen dan upah minimum dan pengangguran sebagai variabel independennya. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan}_{it} = 22.24 - 1.956 (\text{upah minimum}_{it}) - 0.100 (\text{Pengangguran}_{2it}) \dots (4.1)$$

Persamaan regresi berganda maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 22,24 menunjukkan jika semua variabel independen yaitu upah minimum dan pengangguran dianggap tetap maka nilai kemiskinan yang dilambangkan Y adalah sebesar 22,24 persen.
2. Nilai koefisien upah minimum (X_1) -1.956 hal ini menunjukkan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diabaikan atau dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen upah minimum, kemiskinn juga ikut turun sebesar - 1.956 persen.
3. Nilai koefisien pengangguran (X_2) sebesar -0.100 hal ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan jika variabel lainnya diabaikan atau dianggap tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen pengangguran, kemiskinn juga ikut naik sebesar - 0,100 persen.

4.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Koefisien determinasi (adjusted R-Square) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai adjusted R-square yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Berdasarkan tabel diatas besar angka adjusted R-square (R^2) adalah 0.984636. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 98,46%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 98,46% terhadap variabel dependennya. Sisanya 1,54% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi tersebut.

4.5 Pembahasan dan Hasil

Pada bab pembahasan ini akan dibahas pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan, pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dan pengaruh upah minimum, pengangguran terhadap kemiskinan.

4.5.1 Pengaruh upah minimum terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel upah minimum memiliki probabilitas kurang dari 5% yaitu sebesar 0,0000 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum dengan kemiskinan. Dan nilai koefisien variabel upah minimum sebesar - 1.956, artinya bahwa setiap upah minimum mengalami peningkatan 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,956 persen. Variabel upah minimum yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien upah minimum terhadap kesejahteraan

buruh, maupun pekerja . Semakin besar tingkat upah minimum maka semakin baik karena hal tersebut menandakan bahwa semakin tercukupinya kebutuhan untuk hidup layak. Diberlakukannya Keputusan Menteri No.1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi pekerja untuk mendapatkan upah yang wajar dan hidup layak, serta menjadi acuan bagi pengusaha dalam memenuhi kewajiban mereka membayar upah bagi uruh atau pekerja. Dengan demikian, dengan adanya penetapan upah minimum tersebut, para pekerja menjadi terlindungi dan mampu memenuhi kebutuhan dengan standar minimum hidup layak. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya, dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang bermutu dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Aceh.

Variabel upah minimum ini juga menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pihak pemerintah dalam memaksimalkan tingkat kemiskinan. Asumsinya semakin tinggi upah yang diterima menunjukkan semakin menurunnya wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hasil dari analisis regresi dalam penelitian ini menemukan bahwa upah minimum memiliki nilai koefesin yang negatif sehingga dapat diartikan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di aceh. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori yang ada, yang menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan sebab akibat terhadap kemiskinan, dimana upah minimum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendah tingginya kemiskinan yang ada di Aceh. Artinya, apabila tingkat upah minimum besar maka akan memberikan dampak baik kepada tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh ikhsan dan ihsan (2018) yang memperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan tinjauan kemaslahatan , semakin terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat maka semakin sejahtera masyarakat tersebut sehingga bisa dikatakan ada kemaslahatan. Kesimpulannya semakin tinggi upah minimum yang diberikan maka semakin terpenuhi kebutuhan pekerja dan meningkatkan kemaslahatan.

4.5.2 Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara langsung pengangguran terbuka berhubungan negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan. Hasil dari analisis regresi pada penelitian pengangguran ini menemukan bahwa memiliki probability lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0.0086 dengan koefisien -0.100 sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dan dengan nilai koefisien variabel pengangguran sebesar -0,100 , artinya bahwa setiap pengangguran mengalami peningkatan 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,100 persen. Karena semakin tinggi pengangguran dalam perekonomian maka akan meningkatkan kemiskinan. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus diturunkan, penurunan tingkat pengangguran akan terlaksana jika lapangan pekerjaan tersedia. Diskriminasi instansi perusahaan/ pemerintahan dalam merekrut pegawai atau karyawan hendaknya dihilangkan, perekrutan yang benar-benar berdasarkan atas kemampuan bukan atas dasar kekerabatan, ras, suku, agama dan lainnya. Penyediaan lapangan pekerjaan yang berbasis dengan potensi-potensi yang masing-masing dimiliki wilayah harus ditingkatkan. Kesadaran dari masyarakat yang masih menganggur harus segera ditingkatkan, karena dengan hanya mengharapkan pemberian dari keluarga yang tidak menganggur dan memiliki penghasilan yang tinggi tidak akan meningkatkan kesejahteraan bagi individu yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Disini pemerintah juga harus

memperhatikan jumlah lapangan pekerjaan yang banyak sehingga bisa menekan angka pengangguran.

Tidak semua orang yang sementara menganggur itu selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selain itu juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (*part time*) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Dalam islam, rezeki memang sudah ditentukan oleh Allah SWT, tetapi juga harus berusaha. Dalam artian wajib berusaha bekerja agar terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan. Maka dari itu jika pengangguran turun maka kesejahteraan umat meningkat sehingga dapat dikatakan masalah.

4.5.3 Pengaruh Upah minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.4 di atas, maka diperoleh nilai F statistik sebesar 0,0000 yang mana nilai tersebut memiliki nilai probablity yang lebih kecil dari 5% sehingga semua variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau

simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada taraf kepercayaan 95%. Dapat disimpulkan bahwa upah minimum dan pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di Aceh. Pekerja di Indonesia maupun di Aceh mengalami apa yang disebut “upah besi”, dimana para pekerja diberikan upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja (buruh). Upah yang diberikan ternyata secara riil nilainya sangat rendah meskipun secara nominal angkanya mungkin cukup tinggi. Dampak dari upah besi juga berdampak pada penajatan pekerjaan oleh pengusaha. Ini dikemukakan oleh Charles Brown (1998). Ia mengatakan bahwa penentuan upah besi akan berdampak pada penajatan pekerjaan yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. (Samuelson dan Nordhaus dalam Ravi Dwi, 2010: 3) Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat penambahan lapangan kerja yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah membuat beberapa program yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Raskin (beras Miskin), BLT

(Bantuan Langsung Tunai), Asuransi Miskin, Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) dan masih banyak program pemerintah yang intinya mengentaskan kemiskinan. Jika upah minimum dan pengangguran teratasi, maka kemiskinan bisa berkurang sehingga tercipta ekonomi yang stabil dan kesejahteraan .

Ekonomi Islam memandang kekayaan alam dan kekayaan SDM harus dilakukan atau diinvestasikan untuk kepentingan manusia pada masa depan, bukan untuk diperjual belikan. Islam menganjurkan manusia untuk berinvestasi, berdagang dan berbisnis. Islam juga memudahkan segala sumber rejeki baik dari sumberdaya alam, maupun dari sumber daya manusia, karena pada hakikatnya rejeki dan kekayaan itu datangnya dari Allah bukan karena manusia. Ekonomi justru mendorong agar manusia bersikap rendah hati, *tawadlu'*, kerja keras, tidak boros dan menjauhi perbuatan buruk yang menyebabkan kemiskinan. seseorang yang ingin kaya harus menghindari dari perbuatan dhalim dan ketidakberdayaan, mengurangi perbuatan jelek dan memperbaiki perbuatan baik. Oleh karena itu, ekonomi islam menganjurkan agar kemiskinan terhindar, maka ada dua langkah yang harus dilakukan :

1. Mengembangkan Sumber daya manusia untuk kepentingan masa depan kehidupan, termasuk sumber daya alam.
2. Mengharuskan manusia mentaati aturan Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunah, dimana aturan tersebut menjadikan manusia bahagia ddunia dan akhirat.

Surat Al-Araf ayat 96 menyebutkan”

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat/apa yang mereka usahakan”.

Dalam perspektif ekonomi Islam, banyak kita temui kalimat Iman, taqwa, syukur, dhalim dan kufur. Kemurahan dan kekayaan akan kita peroleh jika kita berbuat baik terhadap Allah dan menjalankan aturan Allah. Sehingga, kita terhindar dari perbuatan maksiat, kekufuran dan kemiskinan nikmat. Ekonomi Islam mengajurkan agar manusia rajin bekerja, rajin mencari kemakmuran dan menjauhi sikap monopoli. Unsur utama dalam ekonomi Islam mencapai derajat kaya adalah pertama, memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan SDM untuk masa depan. Kedua, memiliki sikap jujur, adil dan tidak boros dalam menjalani hidup sehingga kita bisa kaya. Ketiga, berinvestasi dengan cara berdagang, bisnis, dan jual beli secara halal, juga suka berderma untuk kepentingan umum agar bisa mengurangi kemiskinan. Keempat, menghindari transaksi yang bernuansa ribawi dan bunga, karena akan menyengsarakan peminjam.

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa solusi kemiskinan adalah mempunyai badan yang sehat jasmani dan rohani. Mempunyai rencana atau pandangan hidup di masa depan. Dan pemenuhan kebutuhan hidup yakni pakaian dan makanan pokok.

Islam juga memerintahkan agar manusia rajin bekerja, rajin ibadah dan tidak melampui batas kehidupan yang telah digariskan oleh Al-Quran. Sikap yang buruk harus dikendalikan agar tidak terjrumus kedalam kekufuran. Islam menjunjung tinggi martabat dan moral, bahkan Islam menginginkan umatnya kaya raya dan suka berderma, sehingga ajaran Islam mengenai zakat, sedekah dan wakaf menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan sosial sehingga tercipta kemaslahatan umat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Aceh dalam perspektif kemaslahatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Variabel upah minimum memiliki probabilitas kurang dari 5% yaitu sebesar 0,0000 sehingga H_{01} ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum dengan kemiskinan. Dan nilai koefisien variabel upah minimum sebesar -1,956, artinya bahwa setiap upah minimum mengalami peningkatan 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,956 persen.
2. Variabel pengangguran memiliki probabilitas lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,0086 sehingga H_{02} ditolak dan H_2 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengangguran dengan kemiskinan. Dan dengan nilai koefisien variabel pengangguran sebesar -0,100, artinya bahwa setiap pengangguran mengalami peningkatan 1 persen maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,100 persen.

3. Ada hubungan secara simultan antara upah minimum dan pengangguran dengan tingkat kemiskinan di Aceh. Nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 artinya, secara simultan atau bersama-sama upah minimum dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.
4. Dalam tinjauan ekonomi Islam juga memerintahkan agar manusia rajin bekerja, rajin ibadah dan tidak melampaui batas kehidupan yang telah digariskan oleh Al-Quran. Sikap yang buruk harus dikendalikan agar tidak terjerumus kedalam kekufuran. Islam menjunjung tinggi martabat dan moral, bahkan Islam menginginkan umatnya kaya raya dan suka berderma, sehingga ajaran Islam mengenai zakat, sedekah dan wakaf menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan sosial sehingga tercipta kemaslahatan umat.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode waktu yang digunakan hanya lima tahun, akan lebih baik jika periode waktunya lebih lama sehingga dapat lebih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa variabel upah minimum dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga pemerintah hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap variabel-variabel tersebut dan dapat memberikan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan.
2. Setiap daerah mempunyai karakteristik dan masalah kemiskinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu strategi penanggulangan kemiskinan daerah perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan pada masing-masing daerah.
3. Pemerintah telah merencanakan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup berbagai bidang. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi oleh semua pelaku (stakeholders) penanggulangan kemiskinan, untuk mengetahui sejauh mana dampak program/kegiatan yang mencakup manfaat maupun sasaran program itu sendiri telah berjalan.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah observasi dan jumlah variabel yang akan digunakan juga disarankan untuk menggunakan metode analisis lainnya agar memberikan hasil yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Achfuda Vio, (2010) Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, PDB, Inflasi, dan tingkat Teknologi Terhadap PMDN di Indonesia Periode 1986-2008. Semarang: UNDIP.

Adhi Whisnu, (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Semarang: UNDIP.

Amalia, F(2012) Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KIT) Periode 2001-2010, *Jurnal Econosains*,X(2),158-169

Atabik, A. (2015). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*. 2(2). 340-361.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2017).

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2019).

Dwi Ravi. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Jateng Tahun 2005-2008*, Semarang: UNDIP.

Drapper, N dan Smith, H. (1992). Analisis Regresi Terapan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gujarati, D. N. (2010). Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.

Hardiani, Amir.A,Harlik (2013) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*,1 (2),109-120

Hoover, Garry A. And Geoffrey L. Wallace. "Examining the Relationship between the Poverty Rate and Economic Conditions. A Comparison of the 1980s-1990s". The

- University of Alabama. Economic, Finance and Legal Working Paper Series. Oktober 2003.
- Ihsan, Ikhsan (2018) Analisis Pengaruh UMP, Inflasi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3), 408-419
- I Made, (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja, dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing langsung di Indonesia (1990-2009)*. Semarang, UNDIP.
- Kaufman, Bruce. (2000). *The Economics of Labor Markets, Fifth Edition*, The Dryden Press. New York.
- Khabhibi Achmad, (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Surakarta: USM.
- Mankiw Gregory, (2006). Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga, Jakarta, Salemba Empat.
- Mudrajad Kuncoro, (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro, (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Erlangga.
- Nasir (2014), Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 59-64
- Powers, Elizabeth T. "Growth and Poverty Revisited". Federal Bank of Cleveland, Economic Commentary, 05, 1995
- Prawira (2018), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat
- Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia, *Jurnal EcoGen*, 1(1), 162-168
- Pratama (2014) Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal bisnis dan Manajemen*, 4 (2), 210-223

- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Sari.,J, Mangkuwinata.,S.Deny (2017) Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2),94-107
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi. Teori Pengantar* (Edisi Ketiga ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saputro.S.E.A, Utomo.P.A (2010) Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan secara Makro di Lima Belas Provinsi Tahun 2007, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 6 (2), 89-100
- Sekaran, Uma.(2011).*Research Method For Bussiness (Metode Penelitian untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supranto, J. (2001). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Syarifuddin,A. (2001),*Ushul Fiqh Jilid 2*.Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Tulus H. Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun (2003). tentang *Ketenagakerjaan*. Republik Indonesia.
- Yanti Nurfitri, (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1999-2009. Yogyakarta: UPN Yogyakarta.
- Yuningsih.(2018) Upah Minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Intaj*, 4(2),277-291
- Warsilan,Rochaida.E, Aziz.A.G (2016) Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan diKabupaten Kutai

Kartanegara, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 12(1), 29-48



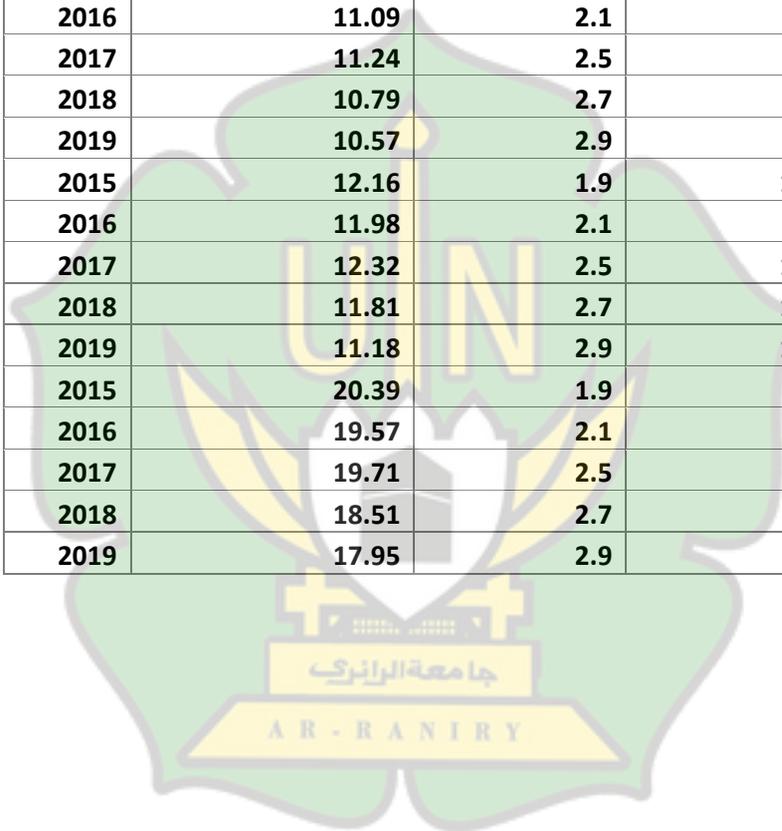
Lampiran.1. data persentase tingkat kemiskinan, UMP, Dan tingkat pengangguran terbuka

tahun	Tingkat kemiskinan (Y)	UMP Perjuta (X1)	pengangguran (X2)
2015	20.43	1.9	8.51
2016	19.93	2.1	
2017	20.2	2.5	3.12
2018	19.78	2.7	4.94
2019	18.99	2.9	5.87
2015	21.72	1.9	7.03
2016	21.6	2.1	
2017	22.11	2.5	7.14
2018	21.25	2.7	8.04
2019	20.78	2.9	8.6
2015	13.24	1.9	10.01
2016	13.48	2.1	
2017	14.07	2.5	7.24
2018	14.01	2.7	6.08
2019	13.09	2.9	6.58
2015	14.91	1.9	9.79
2016	14.46	2.1	
2017	14.86	2.5	4.75
2018	14.29	2.7	3.76
2019	13.43	2.9	3.46
2015	15.85	1.9	13.89
2016	15.06	2.1	
2017	15.25	2.5	8.42
2018	14.49	2.7	6.93
2019	14.47	2.9	7.64
2015	17.51	1.9	3.13
2016	16.64	2.1	
2017	16.84	2.5	3.91
2018	15.58	2.7	2.13

2019	15.5	2.9	2.65
2015	21.46	1.9	6.77
2016	20.38	2.1	
2017	20.28	2.5	6.2
2018	19.31	2.7	8.67
2019	18.79	2.9	7.45
2015	15.93	1.9	6.81
2016	15.55	2.1	
2017	15.41	2.5	8.49
2018	14.47	2.7	7.3
2019	13.92	2.9	7.75
2015	21.18	1.9	10.25
2016	21.25	2.1	
2017	21.43	2.5	7.64
2018	20.47	2.7	7.23
2019	19.46	2.9	6.89
2015	16.94	1.9	11.02
2016	15.95	2.1	
2017	15.87	2.5	4.5
2018	14.31	2.7	3.52
2019	13.56	2.9	3.88
2015	19.2	1.9	17.05
2016	19.46	2.1	
2017	19.78	2.5	11.02
2018	18.27	2.7	10.18
2019	17.39	2.9	8.63
2015	18.25	1.9	11.66
2016	18.03	2.1	
2017	18.31	2.5	3.16
2018	17.1	2.7	3.95
2019	16.26	2.9	4.3
2015	21.95	1.9	2.24
2016	21.86	2.1	

2017	21.97	2.5	1.71
2018	20.7	2.7	2.52
2019	19.87	2.9	1.74
2015	14.57	1.9	14.03
2016	14.51	2.1	
2017	14.69	2.5	5.43
2018	14.21	2.7	6.25
2019	13.38	2.9	6.07
2015	20.13	1.9	3.97
2016	19.25	2.1	
2017	19.34	2.5	4.11
2018	18.97	2.7	5.94
2019	17.97	2.9	5.35
2015	15.93	1.9	4.91
2016	15.01	2.1	
2017	14.85	2.5	6.23
2018	14.16	2.7	4.95
2019	13.36	2.9	4.19
2015	21.55	1.9	1.04
2016	21.43	2.1	
2017	21.14	2.5	1.06
2018	20.13	2.7	1.07
2019	19.3	2.9	1.02
2015	21.4	1.9	9.18
2016	21.18	2.1	
2017	21.82	2.5	4.89
2018	20.17	2.7	5.02
2019	19.31	2.9	4.36
2015	7.72	1.9	12
2016	7.41	2.1	
2017	7.44	2.5	7.75
2018	7.25	2.7	7.29
2019	7.22	2.9	6.92

2015	17.69	1.9	7.26
2016	17.33	2.1	
2017	17.66	2.5	3
2018	16.31	2.7	4.21
2019	15.6	2.9	4.6
2015	11.62	1.9	8.55
2016	11.09	2.1	
2017	11.24	2.5	7.03
2018	10.79	2.7	7.12
2019	10.57	2.9	7.7
2015	12.16	1.9	13.06
2016	11.98	2.1	
2017	12.32	2.5	10.51
2018	11.81	2.7	12.52
2019	11.18	2.9	11.06
2015	20.39	1.9	8.24
2016	19.57	2.1	
2017	19.71	2.5	4.91
2018	18.51	2.7	6.49
2019	17.95	2.9	7.25



Lampiran 2. hasil olah data

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/27/20 Time: 02:47
 Sample: 2015 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 92

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.24633	0.649518	34.25054	0.0000
X1	-1.956467	0.188042	-10.40439	0.0000
X2	-0.100657	0.037160	-2.708763	0.0086

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.984636	Mean dependent var	16.69576
Adjusted R-squared	0.979133	S.D. dependent var	3.719720
S.E. of regression	0.537330	Akaike info criterion	1.821973
Sum squared resid	19.34446	Schwarz criterion	2.507241
Log likelihood	-58.81075	Hannan-Quinn criter.	2.098553
F-statistic	178.9142	Durbin-Watson stat	1.443196
Prob(F-statistic)	0.000000		